Penerapan *Quality Assurance* dalam Menjamin Mutu Pendidikan di SMAN 14 Makassar

Adelia Indri Mancong*[1], Sita Anggraeni[2], Supriadi Torro[3], Liza Dwi Eftiza Khairunnisa[4]
Universitas Negeri Makassar[1-4]
e-mail: adeliaindri54@gmail.com[1], sitaanggraeni05@gmail.com[2], supriaditorro@unm.ac.id[3], lizadwi.eftiza@unm.ac.id[4]

ABSTRAK

Pemastian kualitas adalah aspek krusial dalam menjaga dan meningkatkan standar pendidikan di institusi. Dalam pelaksanaannya, pemastian kualitas terkait bukan hanya dengan output pendidikan, namun juga meliputi aspek perencanaan, manajemen, dokumentasi, serta pengembangan sumber daya pengajar dan pendidikan. Penelitian ini dibuat untuk mengeksplorasi pelaksanaan Penjaminan Mutu di SMA Negeri 14 Makassar, yang mencakup dasar pelaksanaan, hubungannya dengan visi institusi, pengembangan pengajar dan staf pendidikan, proses akreditasi, serta tantangan yang dihadapi. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif. Informasi diperoleh melalui wawancara langsung dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 14 Makassar. Pengumpulan data wawancara diubah menjadi teks tertulis, dirapikan, dan dianalisis menggunakan tema yang teridentifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemastian kualitas di sekolah telah dilakukan melalui pengelolaan administrasi, perencanaan program, penggunaan ARKAS, serta pengembangan profesional guru secara berkala. SMA Negeri 14 Makassar juga telah meraih akreditasi A sebanyak empat kali. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan seperti keterbatasan waktu, banyaknya dokumen dan laporan yang perlu disiapkan, serta pembagian tugas karena orang-orang yang terlibat dalam pemastian kualitas juga memiliki tanggung jawab mengajar. Penerapan Penjaminan Mutu di SMA Negeri 14 Makassar telah terlaksana dan mendukung pengelolaan mutu institusi. Namun, pelaksanaannya memerlukan integrasi yang lebih baik dengan perencanaan sekolah agar beban administratif bisa dikurangi dan pemastian kualitas dapat dilaksanakan dengan lebih efisien.

Kata kunci : *Penjaminan Mutu; SPMI; Akreditasi; Manajemen Sekolah; SMA Negeri 14 Makassar.*

ABSTRACT

Quality assurance is a crucial aspect in maintaining and improving educational standards in institutions. In practice, quality assurance is related not only to educational output but also encompasses aspects of planning, management, documentation, and the development of teaching and educational resources. This study was conducted to explore the implementation of Quality Assurance at SMA Negeri 14 Makassar, which includes the basis for implementation, its relationship to the institution's vision, the development of teaching staff, the accreditation process, and the challenges faced. This study adopted a descriptive qualitative approach. Information was obtained through direct interviews with the Vice Principal for Curriculum at SMA Negeri 14 Makassar. The collected interview data was converted into written text, organized, and analyzed using identified themes. The research findings indicate that quality assurance in the school has been carried out through administrative management, program planning, the use of ARKAS, and regular teacher professional development. SMA Negeri 14 Makassar has also achieved A accreditation four times. However, in its implementation, challenges remain such as time constraints, the large number of documents and reports that need to be prepared, and the division of tasks because those involved in quality assurance also have teaching responsibilities. The implementation of Quality Assurance at SMA Negeri 14 Makassar has been implemented and supports the institution's quality management. However, its implementation requires better integration with school planning to reduce administrative burdens and ensure more efficient quality assurance.

Keywords **:** *Quality Assurance; SPMI; Accreditation; School Management; SMA Negeri 14 Makassar.*

PENDAHULUAN

Setiap bangsa yang ingin bersaing di tengah tuntutan zaman membutuhkan sumber daya manusia yang disiapkan secara sungguh-sungguh, dan pendidikan bermutu menjadi syarat utamanya. Mutu pendidikan

tidak berhenti pada ketersediaan sekolah, guru, dan ruang kelas. Mutu dipahami sebagai sejauh mana proses pembelajaran dan hasilnya memenuhi standar serta harapan yang telah ditetapkan (Mukri et al., 2024). Dengan pengertian ini, mutu selalu bersifat relatif terhadap ukuran: sebuah layanan baru dapat disebut bermutu jika ada patokan yang jelas dan ada upaya untuk memeriksa apakah patokan itu tercapai. Karena itu, negara tidak cukup hanya menyediakan layanan pendidikan. Negara juga perlu membangun mekanisme yang memastikan layanan tersebut memenuhi ukuran yang diharapkan. Mekanisme inilah yang dikenal sebagai penjaminan mutu.

Di Indonesia, penjaminan mutu pendidikan dijalankan melalui dua bentuk yang saling melengkapi, yaitu penjaminan mutu internal yang digerakkan oleh satuan pendidikan sendiri dan penjaminan mutu eksternal yang dilakukan pihak di luar sekolah (Mukri et al., 2024). Pembagian ini menegaskan bahwa mutu tidak semata-mata urusan penilai dari luar, tetapi juga tanggung jawab warga sekolah. Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, penjaminan mutu internal diwujudkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memperoleh landasan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 (Kemendikbud, 2016). Adapun ukuran mutu yang menjadi rujukan sekolah dirumuskan dalam Standar Nasional Pendidikan (Republik Indonesia, 2021). Dengan demikian, sekolah memiliki pegangan hukum sekaligus tolok ukur yang jelas, dan dituntut untuk merancang, menjalankan, serta mengawal sendiri upaya pemenuhan mutunya.

Secara konseptual, SPMI bekerja sebagai siklus, bukan kegiatan yang selesai dalam satu kali pelaksanaan. Penelitian di SMA Negeri 1 Batang memperlihatkan bahwa siklus tersebut dimulai dari pemetaan mutu dengan membaca rapor mutu atau rapor pendidikan. Hasil pemetaan itu menjadi dasar penyusunan rencana pemenuhan mutu yang mengacu pada delapan standar dan dituangkan dalam Rencana Kerja Jangka Menengah atau Rencana Kerja Tahunan. Rencana tersebut kemudian dilaksanakan oleh tim pengembang mutu, dan siklus ditutup dengan evaluasi atau audit (Sugiarti, 2023). Gambaran serupa ditemukan di SMA Negeri 7 Gowa. Di sana, lima tahap, yaitu penetapan standar, pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, pelaksanaan, dan evaluasi, berputar dalam satu tahun akademik menuju perbaikan mutu berkelanjutan (Rukmana et al., 2025). Meskipun rincian tahapannya tidak persis sama, kedua contoh ini menunjukkan logika yang konsisten: mutu dipetakan, direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, lalu hasil evaluasi menjadi bahan untuk putaran berikutnya. Hal ini juga berarti setiap tahap menuntut kerja yang nyata dari orang-orang di sekolah, mulai dari membaca data, menyusun dokumen perencanaan, hingga menyiapkan bukti pelaksanaan untuk dievaluasi.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sekolah yang menjalankan siklus tersebut cenderung memperoleh dampak positif. Di Sanggau dan wilayah lain, penerapan SPMI dikaitkan dengan pembelajaran yang lebih inovatif, prestasi siswa, dan kepuasan pengguna layanan (Gustini & Yolanda, 2019). Temuan di Kabupaten Bengkayang menambahkan nuansa yang penting. Studi pada dua SMA berakreditasi A di sana menemukan bahwa penetapan standar, evaluasi diri, perencanaan, pelaksanaan, hingga audit sudah berjalan baik, meskipun sejumlah kendala masih muncul dalam praktiknya (Dimmera & Purnasari, 2021). Artinya, predikat akreditasi yang tinggi tidak otomatis menandakan pelaksanaan yang bebas hambatan. Kajian SPMI juga telah menjangkau jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah kejuruan (Mardhiyah et al., 2023; Zahrok, 2020), yang menunjukkan bahwa persoalan penjaminan mutu relevan lintas jenjang dan jenis sekolah. Di sisi lain, kajian tentang pemanfaatan rapor mutu sebagai dasar perencanaan sekolah menunjukkan bahwa data mutu baru bermakna bila diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran, serta masih menuntut kapasitas analisis data guru (Meldayani et al., 2026; Musakirawati et al., 2023). Dengan kata lain, ketersediaan data saja belum cukup. Ada kerja analitis dan administratif yang harus dipikul oleh pelaksana di sekolah agar data tersebut berubah menjadi keputusan.

Di luar kajian mutu secara langsung, penelitian sosiologi pendidikan di Sulawesi Selatan memberi bahan pembanding yang berguna tentang bagaimana kebijakan pendidikan benar-benar dijalankan di lapangan. Studi tentang penerapan Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 4 Makassar menggambarkan bahwa perubahan kebijakan tidak berlaku dengan sendirinya, tetapi harus diterjemahkan melalui tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran di kelas (Wulansari et al., 2024). Penelitian lain menempatkan guru dan kepala sekolah sebagai aktor kunci penerapan kebijakan kurikulum di Takalar dan Bulukumba (Diva & Torro, 2025; Daniel et al., 2023). Di Makassar, lembaga pendidikan alternatif juga terbukti harus menyesuaikan bentuk kegiatannya ketika kondisi berubah (Awaru & Torro, 2022), yang menunjukkan

bahwa pelaksanaan di lapangan selalu bernegosiasi dengan keadaan. Dari sisi profesionalisme, mutu pendidik dikaitkan dengan etika profesi yang menekankan kejujuran, akuntabilitas, dan keterbukaan. Rangkaian temuan ini mengarah pada satu pemahaman yang sama, yakni keberhasilan suatu kebijakan, termasuk kebijakan penjaminan mutu, sangat bergantung pada orang-orang yang menerjemahkan dan menjalankannya.

Meskipun demikian, rujukan yang ditelaah dalam artikel ini lebih banyak menyoroti tahapan siklus dan faktor pendukung, dan belum banyak menempatkan pengalaman pelaksana sebagai pusat analisis. Secara khusus, beban administratif yang dirasakan wakil kepala sekolah yang masih mengajar belum mendapat perhatian memadai. Padahal, di tingkat sekolah, di situlah penjaminan mutu diuji: dokumen harus disusun, data harus dibaca, dan kegiatan harus dijalankan oleh orang yang pada saat bersamaan juga memikul tugas mengajar. SMA Negeri 14 Makassar menarik dikaji karena telah berulang kali terakreditasi A, sehingga muncul pertanyaan apakah capaian itu berjalan beriringan dengan beban kerja yang wajar bagi para pelaksananya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan penerapan *quality assurance* di SMA Negeri 14 Makassar beserta tantangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif karena tujuannya memahami bagaimana penjaminan mutu dijalankan dan dimaknai oleh pelaksananya, bukan mengukur pengaruh antarvariabel. Pendekatan serupa lazim dipakai dalam kajian SPMI di sekolah, yang mengandalkan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Dimmera & Purnasari, 2021; Rukmana et al., 2025).

Lokasi penelitian adalah SMA Negeri 14 Makassar. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan Nurlina Anas, yang menjabat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, pada Hari Rabu, 30 Septermber 2026. Informan dipilih secara purposif karena terlibat langsung dalam pengelolaan kurikulum dan administrasi mutu sekolah. Wawancara dipandu pertanyaan tentang waktu dan alasan penerapan penjaminan mutu, keterkaitannya dengan visi dan misi, upaya meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, hasil akreditasi, hambatan, serta pelaksanaan SPMI. Percakapan direkam, ditranskrip, kemudian dirapikan tanpa mengubah makna jawaban. Analisis dilakukan dengan mereduksi data, mengelompokkannya ke dalam tema, menyajikannya secara naratif, lalu menarik kesimpulan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni bertumpu pada satu informan sehingga temuan mencerminkan sudut pandang pengelola kurikulum dan belum mewakili guru, kepala sekolah, maupun siswa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjaminan Mutu Sebagai Manajemen Administrasi Sejak Sekolah Berdiri

Penjaminan mutu adalah elemen krusial dalam manajemen pendidikan karena berkaitan dengan usaha sekolah dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu proses pendidikan. Implementasinya tidak hanya terkait dengan hasil pembelajaran, melainkan juga meliputi perencanaan, pengaturan administrasi, pelaksanaan program, serta penilaian terhadap aktivitas yang telah dilaksanakan. Oleh sebab itu, penjaminan mutu harus terintegrasi dalam sistem manajemen sekolah agar semua program dapat diselenggarakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Proses wawancara dalam penelitian tentang penjaminan mutu pendidikan

Menurut wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 14 Makassar yaitu ibu Nurlina Anas, sebagai informan. Penjaminan mutu telah menjadi bagian dari manajemen sekolah sejak awal berdirinya institusi tersebut. Penerapannya berkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan dan administrasi, seperti Kurikulum Satuan Pendidikan, SOP, ARKAS, serta perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Penemuan ini mengindikasikan bahwa sekolah telah memasukkan penjaminan mutu dalam manajemen yang dilakukan setiap harinya. Hal ini dapat membantu sekolah dalam mengelola program pendidikan dengan lebih fokus. Namun, penjaminan mutu tidak seharusnya hanya dilihat sebagai pemenuhan dokumen administrasi, tetapi juga sebagai proses untuk mengenali kekurangan, mengevaluasi pelaksanaan program, serta menentukan langkah-langkah perbaikan. Sugiarti (2023) mengungkapkan bahwa pelaksanaan SPMI mencakup tahap pemetaan mutu, perencanaan pemenuhan mutu, eksekusi, dan evaluasi. Dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, perencanaan pendidikan menjadi dasar bagi seluruh fungsi manajemen sehingga penjaminan mutu perlu dihubungkan dengan perencanaan program sekolah (Arismunandar et al., 2016). Dengan demikian, pengelolaan administrasi harus dihubungkan dengan proses evaluasi dan perbaikan mutu secara berkesinambungan.

Hubungan Antara Visi Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Visi sekolah berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan arah perkembangan pendidikan serta pelaksanaan berbagai program. Visi yang konkrit harus diterapkan dalam tindakan nyata agar seluruh anggota sekolah memahami tujuan yang ingin diraih. Selain itu, hubungan antara visi dan program sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tidak hanya terfokus pada penyelesaian tugas, tetapi juga menunjang peningkatan kualitas pendidikan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, SMA Negeri 14 Makassar memiliki visi "Terdidik dalam prestasi, berkarakter, dan peduli lingkungan. " Visi ini diterapkan melalui beragam kegiatan. Peningkatan prestasi meliputi pengelolaan administrasi, pengaturan kelas, serta manajemen pendidik dan tenaga administrasi. Sementara itu, pembentukan karakter dilakukan dengan mendampingi sikap dan perilaku siswa, sedangkan kepedulian terhadap lingkungan diimplementasikan dengan menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan area sekolah.

Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa visi sekolah telah menjadi acuan dalam pembagian tanggung jawab serta penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Meskipun begitu, keberhasilan penerapan visi memerlukan dukungan dari indikator yang jelas agar hasilnya dapat dievaluasi. Sebagai contoh, prestasi dapat dinilai dari perkembangan hasil akademik dan nonakademik, karakter dapat dilihat melalui perilaku sehari-hari siswa, dan kepedulian lingkungan dapat diukur dari partisipasi warga sekolah dalam menjaga kebersihan. Dengan adanya indikator tersebut, sekolah bisa mengevaluasi sejauh mana program yang dijalankan mendukung pencapaian visi. Hal ini sejalan dengan pendapat Meldayani et al. (2026), yang menekankan pentingnya pemanfaatan data kualitas sebagai dasar dalam penentuan perencanaan dan prioritas program sekolah. Pandangan ini sejalan dengan konsep perencanaan pendidikan yang menempatkan visi dan tujuan sekolah sebagai acuan dalam menyusun program dan prioritas kegiatan (Arismunandar et al., 2016).

Upaya Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Pendidik beserta tenaga pendidikan memiliki peranan yang sangat krusial dalam pelaksanaan pendidikan. Mutu pendidikan tidak hanya bergantung pada fasilitas dan sistem manajemen sekolah, tetapi juga pada kemampuan individu yang melaksanakan proses pendidikan. Oleh sebab itu, peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga pendidikan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui program pembinaan, pelatihan, sosialisasi, serta aktivitas pengembangan profesi lainnya.

SMA Negeri 14 Makassar juga melaksanakan upaya tersebut melalui kegiatan workshop dan sosialisasi yang berkaitan dengan pengajaran. Berdasarkan informasi dari wawancara, aktivitas ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam memperbaiki mutu pengajaran dan proses belajar siswa. Pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik sekolah, sedangkan dalam ARKAS telah ditetapkan agenda rutin setidaknya dua kali dalam satu tahun ajaran, yaitu pada semester ganjil dan genap. Sekolah juga memanfaatkan Hari Belajar Guru untuk mengkaji materi yang sedang diperlukan oleh para pendidik.

Model pembinaan ini menunjukkan adanya usaha dari sekolah untuk menyatukan perencanaan rutin dengan penyesuaian terhadap kebutuhan yang muncul selama proses pendidikan. Jadwal yang tercantum dalam ARKAS menjamin bahwa aktivitas pengembangan pendidik tetap mendapatkan perhatian dalam perencanaan sekolah. Di sisi lain, keluwesan dalam waktu pelaksanaan memungkinkan materi pembinaan diubah sesuai dengan isu atau kebutuhan yang dihadapi oleh guru.

Dari sudut pandang jaminan mutu, pembinaan bagi pendidik dan tenaga pendidikan tidak seharusnya hanya dinilai dari seberapa sering workshop diadakan. Yang lebih krusial adalah bagaimana hasil dari pelatihan tersebut diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan menjadikan perubahan terhadap kualitas pengajaran.

Akreditasi A Sebagai Gamabaran Capaian Mutu di Sekolah

Akreditasi merupakan suatu bentuk evaluasi eksternal terhadap penyelenggaraan pendidikan. Keberadaan akreditasi memberikan pemahaman tentang sejauh mana manajemen dan implementasi pendidikan di suatu institusi sekolah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Tetapi, hasil dari akreditasi harus diterima sebagai salah satu indikator kualitas dan bukan satu-satunya ukuran kesuksesan sekolah.

Sekolah SMA Negeri 14 Makassar sudah berpengalaman dalam mempertahankan hasil akreditasi yang memuaskan. Berdasarkan informasi yang didapatkan, sekolah ini telah meraih Akreditasi A sebanyak empat kali dengan setiap hasil mendapatkan status unggul. Informan memaknainya sebagai indikasi bahwa manajemen serta pelaksanaan pendidikan di sekolah sudah berada pada tingkat yang positif.

Pencapaian akreditasi tersebut mencerminkan konsistensi institusi dalam memenuhi berbagai standar yang dijadikan acuan penilaian. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sekolah telah berlangsung sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Penelitian Dimmera dan Purnasari (2021) juga mencatat bahwa sekolah yang mendapatkan akreditasi A telah melaksanakan beragam aspek sistem jaminan mutu berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan.

Akan tetapi, pencapaian akreditasi tidak berarti seluruh tantangan dalam pelaksanaan mutu sudah selesai. Akreditasi adalah evaluasi dalam periode tertentu, sedangkan proses pendidikan berlangsung setiap hari dan terus mengalami perubahan. Oleh karena itu, sekolah perlu melakukan evaluasi internal untuk memahami masalah yang muncul dalam kegiatan sehari-hari. Dalam studi ini, kondisi tersebut terlihat dari tantangan administratif dan pengaturan waktu yang masih dirasakan oleh para pelaksana jaminan mutu meskipun sekolah telah berhasil mendapatkan Akreditasi A berkali-kali.

Dengan cara ini, akreditasi dapat dianggap sebagai salah satu hasil dari proses jaminan mutu serta sebagai alat evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas institusi pendidikan. Sebuah predikat yang positif harus disertai dengan perbaikan yang terus-menerus supaya kualitas tidak hanya nampak saat penilaian akreditasi, tetapi juga terlihat dalam kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah setiap hari.

Tantangan dalam Implementasi Quality Assurance

Dalam implementasi quality assurance di SMA Negeri 14 Makassar, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh para pendidik dan staf pendidikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, tantangan ini tidak disebabkan oleh kurangnya dedikasi dari pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, melainkan lebih pada pelaksanaan tugas-tugas dan administrasi yang harus dikerjakan secara bersamaan. Pendidik tetap memiliki tanggung jawab utama dalam proses belajar mengajar, sedangkan staf pendidikan dan manajemen sekolah juga harus memenuhi berbagai tuntutan administrasi seiring dengan penjaminan mutu. Situasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan quality assurance memerlukan pengelolaan waktu yang efektif, distribusi tugas yang jelas, dan kolaborasi yang baik dari seluruh anggota sekolah. Implementasi Quality Assurance memiliki beberapa tantangan yang di sebutkan oleh informan, yaitu sebagai berikut:

1. Keterbatasan Waktu pada Pendidik

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh para pendidik adalah keterbatasan waktu yang dialami dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab. Guru tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pembelajaran di kelas, tetapi juga harus memenuhi berbagai kebutuhan administratif yang berkaitan dengan penjaminan mutu sekolah. Keadaan ini mengharuskan guru untuk membagi waktu antara persiapan dan pelaksanaan pembelajaran serta menyelesaikan dokumen administrasi yang diperlukan. Dalam pelaksanaan quality assurance, berbagai aktivitas yang dilakukan juga perlu dilengkapi dengan dokumentasi dan laporan,

sehingga menambah beban kerja yang harus ditangani oleh guru. Oleh karena itu, keterbatasan waktu menjadi sebuah tantangan karena guru harus tetap menjaga standar pembelajaran sambil memenuhi tuntutan administrasi sekolah.

2. Beban Administrasi untuk Pendidik

Selain kekurangan waktu, beban administratif menjadi sebuah tantangan signifikan bagi para pendidik. Implementasi penjaminan mutu memerlukan berbagai dokumen sebagai bentuk akuntabilitas atas aktivitas yang telah dilakukan. Banyaknya tuntutan administratif ini bisa membuat guru perlu menyediakan waktu ekstra untuk mempersiapkan dokumen dan laporan. Di satu sisi, dokumentasi adalah elemen krusial untuk menjamin bahwa aktivitas di sekolah dapat dipertanggungjawabkan, namun di sisi lain, tingginya tuntutan administrasi mengurangi waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mempersiapkan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan administrasi yang lebih terpadu supaya dokumen penjaminan mutu tidak menjadi beban yang berulang bagi para pendidik.

3. Dua Beban Kerja pada Tenaga Kependidikan dan Manajer Sekolah

Pada tenaga kependidikan dan manajer sekolah, tantangan terlihat dari adanya tugas ganda. Salah satu contohnya adalah wakil kepala sekolah, yang tidak hanya menjalankan peran sebagai manajer sekolah namun juga memiliki kewajiban tetap untuk mengajar. Dalam situasi seperti itu, waktu yang tersedia harus dibagi antara melaksanakan tugas jabatan, menjalani aktivitas pembelajaran, serta menyelesaikan berbagai administrasi terkait SPMI. Kombinasi beban kerja ini dapat menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi lebih rumit, terutama saat kegiatan dan administrasi SPMI kembali meningkat.

4. Peningkatan Dokumentasi dan Laporan SPMI

Tantangan selanjutnya adalah peningkatan dokumentasi dan laporan dalam pelaksanaan SPMI. Sekolah sudah memiliki berbagai dokumen perencanaan, seperti Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, Rencana Kerja Jangka Menengah, dan rencana kerja tahunan. Namun, saat pelaksanaan SPMI diperkuat kembali, ada penambahan dokumen dan laporan yang harus disusun karena setiap kegiatan wajib memiliki dokumentasi. Kondisi ini menciptakan persepsi bahwa dokumen sistem penjaminan mutu bertambah di luar dokumen perencanaan yang sudah dimiliki oleh sekolah. Padahal, dokumen yang telah ada sebenarnya bisa disinergikan dengan kebutuhan SPMI sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindih dalam pekerjaan administrasi.

5. Perubahan Frekuensi Pelaksanaan SPMI

Tantangan lain berkaitan dengan perubahan frekuensi pelaksanaan SPMI. Menurut informasi dari informan, SPMI sebelumnya pernah aktif dilaksanakan, namun dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, dan saat ini kembali diaktifkan. Perubahan ini membuat sekolah perlu mengadaptasi kembali berbagai kegiatan dan administrasi yang berhubungan dengan SPMI. Situasi ini menunjukkan bahwa kesinambungan penjaminan mutu memerlukan pelaksanaan yang rutin agar pendidik dan tenaga kependidikan dapat mengembangkan kebiasaan kerja yang stabil dan tidak perlu beradaptasi kembali ketika program mutu diaktifkan kembali.

Dinamika SPMI Dan Dilema Pelaksana

Selain tantangan yang berkitan dengan dengan waktu dan pengelolaan, implementasi SPMI juga meninjukkan adanya perubahan dalam pengelaman pihak yang terlibat. Perubahan ini sangat penting untuk diperhatikan karena penjaminan mutu seharusnya dijalankan secara terus-menerus. Fluktuasi dalam tingkat penerapan dapat mempengaruhi cara sekolah menyesuaikan program, mendistribusikan tugas, serta mengelola dokumen.

Dari hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa SPMI pernah mendapatkan perhatian yang cukup besar sekitar lima tahun yang lalu. Setelah periode tersebut, dalam dua hingga tiga tahun terakhir, pelaksanaan SPMI dirasakan semakin menurun, dan pada tahun ini kembali diangkat. Situasi ini membuat sekolah perlu melakukan penyesuaian terhadap kegiatan dan pengelolaan yang berkaitan dengan SPMI.

Dinamika yang terjadi menunjukkan bahwa keberlangsungan sistem penjaminan mutu memiliki peranan yang krusial. Saat tingkat pelaksanaan mengalami perubahan, institusi pendidikan tidak hanya perlu menyesuaikan aktivitas, tetapi juga harus membangun kembali kebiasaan terkait dokumentasi, evaluasi, dan pelaporan. Oleh sebab itu, dukungan yang berkesinambungan dapat membantu lembaga pendidikan dalam

menjalankan penjaminan mutu sebagai suatu proses yang berkelanjutan, bukan sekadar aktivitas yang dilakukan pada saat-saat tertentu.

Masalah lain muncul dari keterkaitan antara dokumen perencanaan yang sudah ada dengan kebutuhan dokumentasi SPMI. Sekolah telah memiliki Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan, Rencana Kerja Jangka Menengah, serta rencana kerja tahunan. Namun, ketika SPMI kembali diimplementasikan, jumlah dokumen dan laporan yang perlu disiapkan meningkat, karena tiap kegiatan memerlukan dokumentasi. Informan juga mengungkapkan bahwa tertib administrasi adalah hal positif, namun ada kalanya semua tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi secara optimal.

Dari situasi tersebut dapat dipahami bahwa masalah bukan terletak pada keberadaan administrasi itu sendiri, melainkan pada cara pengelolaan dan integrasi berbagai dokumen. Jika dokumen SPMI bisa digabungkan dengan dokumen perencanaan yang telah disusun oleh sekolah, maka pekerjaan administratif dapat dilakukan dengan lebih efisien. Meldayani et al. (2026) juga menekankan pentingnya menyatukan data kualitas ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran sekolah agar program yang dihasilkan lebih terfokus. Hal ini juga sejalan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah, yaitu sekolah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam merencanakan serta mengelola programnya secara terpadu (Arismunandar et al., 2016).

Dilema semakin nyata saat pihak utama yang bertugas menjamin mutu juga mempunyai tanggung jawab mengajar. Wakil kepala sekolah harus membagi waktu di antara fungsi jabatan, pengajaran, dan administrasi SPMI. Situasi ini menunjukkan bahwa kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor krusial untuk keberhasilan sistem mutu. Meldayani et al. (2026) juga menekankan betapa pentingnya kapasitas sumber daya manusia, termasuk keterampilan dalam menganalisis data mutu, dalam pemanfaatan sistem penjaminan mutu.

Dengan demikian, implementasi SPMI di SMA Negeri 14 Makassar menunjukkan bahwa keberhasilan dari sistem penjaminan mutu tidak semata-mata bergantung pada tersedianya kebijakan dan dokumen, melainkan juga pada kesiapan para pelaksana. Para guru, wakil kepala sekolah, dan elemen sekolah lainnya memerlukan pembagian tugas yang jelas, waktu yang memadai, dan dukungan yang berkelanjutan agar penjaminan mutu dapat dilaksanakan secara efisien. Pengalaman ini juga sejalan dengan penelitian mengenai penerapan kebijakan pendidikan yang menunjukkan bahwa kesiapan guru dan kepala sekolah sebagai pelaksana menjadi salah satu unsur penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan.

Berdasarkan keseluruhan temuan dan analisis yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa SMA Negeri 14 Makassar telah memiliki berbagai elemen pendukung dalam penerapan jaminan mutu, seperti perencanaan sekolah, pembinaan pendidik serta tenaga kependidikan, pengalaman dalam akreditasi, dan keterlibatan berbagai elemen sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada berbagai tantangan terutama terkait waktu, administrasi, pembagian tugas, dan keberlanjutan SPMI. Oleh karena itu, penguatan mutu harus diarahkan tidak hanya pada pencapaian hasil akhir, tetapi juga pada pengaturan sistem kerja yang memungkinkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjalankan tugas secara seimbang.

SIMPULAN

Penerapan *quality assurance* di SMA Negeri 14 Makassar berakar pada pemahaman bahwa mutu adalah bagian dari manajemen administrasi sekolah sejak awal berdiri, yang diwujudkan melalui dokumen perencanaan, ARKAS, dan pembinaan rutin guru. Visi sekolah diterjemahkan ke dalam pembagian peran antara manajemen, kesiswaan, dan seluruh civitas. Akreditasi A yang telah empat kali diraih menjadi bukti eksternal bahwa tata kelola sekolah unggul, namun bukti itu belum menjawab seberapa wajar beban kerja pelaksananya.

Tantangan terbesar adalah waktu dan beban dokumentasi, terutama saat SPMI kembali digencarkan sementara wakil kepala sekolah masih mengajar. Temuan ini mengisyaratkan bahwa persoalan mutu di sekolah berprestasi sering kali bukan soal komitmen, melainkan soal tata kelola beban kerja. Karena itu, disarankan agar sekolah memadukan dokumen SPMI dengan dokumen perencanaan yang telah ada, memperjelas pembagian kerja tim mutu agar kolaborasi tidak kabur, dan menyusun indikator untuk unsur visi yang belum terukur. Bagi pemangku kebijakan, ritme dukungan yang konsisten diperlukan agar SPMI tidak terasa muncul dan hilang.

Penelitian lanjutan dianjurkan melibatkan lebih banyak informan, seperti kepala sekolah, guru, dan siswa, serta menelaah dokumen mutu sekolah, sehingga gambaran penjaminan mutu menjadi lebih utuh dan teruji silang.

DAFTAR PUSTAKA

Arismunandar, Nurhikmah, H., & Achmad, W. K. S. (2016). *Manajemen berbasis sekolah*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

Ary, D., Jacobs, L.C. & Razavieh, A. 1976. *Pengantar Penelitian Pendidikan.* Terjemahan oleh Arief Furchan. 1982. Surabaya: Usaha nasional

Awaru, A. O. T., & Torro, S. (2022). Komunitas Sokola Pesisir di Kota Makassar pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha, 4*(1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPSU/article/view/48819

Daniel, D., Torro, S., & Ahmad, M. R. S. (2023). Persepsi kepala sekolah mengenai Kurikulum Merdeka pada sekolah penggerak di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, 5*(1), 1–11. [tautan/DOI perlu dilengkapi dari laman jurnal]

Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. (2021). Analisis sistem penjaminan mutu pendidikan pada SMA yang terakreditasi A. *Sebatik, 25*(2), 367–372. https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1615

Diva, T., & Torro, S. (2025). Peran guru dalam penerapan Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Takalar. *Pinisi Journal of Sociology Education Review, 5*(1). https://ojs.unm.ac.id/jser/article/download/65559/31053

Gustini, N., & Yolanda, M. (2019). Implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar. *Jurnal Islamic Education Management, 4*(2). http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/isema/article/view/5695

Jawa Pos. 22 April 2008. *Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri*, hlm. 3

Kansil, C.L. 2002. Orientasi Baru Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesional dalam Memenuhi Kebutuhan Dunia Idustri. *Transpor*, XX(4): 54-5 (4): 57-61

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. [tautan JDIH Kemendikbud perlu dilengkapi]

Kumaidi. 2005. Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 5, No. 4,

Kuntoro, T. 2006. *Pengembangan Kurikulum Pelatihan Magang di STM Nasional Semarang: Suatu Studi Berdasarkan Dunia Usaha.* Tesis tidak diterbitkan. Semarang: PPS UNNES

Mardhiyah, Saputra, A., Fahrezi, D. W., Hasri, S., & Sohiron. (2023). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di sekolah dasar. *Sustainable: Jurnal Kajian Mutu Pendidikan, 6*(2). https://doi.org/10.32923/kjmp.v6i2.4036

Meldayani, S., Indrasari, W., Sulistiyana, & Suhaimi. (2026). Pemanfaatan Rapor Mutu Pendidikan (RMP) sebagai informasi strategis dalam perencanaan di UPTD SDN 2 Bati-Bati. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 6*(1). https://doi.org/10.47709/educendikia.v6i01.8140

Mukri, A., Yosmardi, H., & Jamrizal, J. (2024). Kebijakan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8*(2), 31327–31333. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/18156

Musakirawati, M., Jemmy, J., Anggriawan, F., Triansyah, F. A., Akib, A., & Tahir, A. (2023). Pemanfaatan platform Rapor Pendidikan Indonesia terhadap perencanaan berbasis data. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan, 7*(2), 201–208. https://doi.org/10.26740/jdmp.v7n2.p201-208

Pitunov, B. 13 Desember 2007. Sekolah Unggulan Ataukah Sekolah Pengunggulan ? *Majapahit Pos*, hlm. 4 & 11

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. [tautan JDIH perlu dilengkapi]

Rukmana, H., Wahira, & Ansar. (2025). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMA Negeri 7 Gowa Kabupaten Gowa. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10*(4), 683–694. https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36591

Sadriani, A., Ahmad, M. R. S., & Arifin, I. (2024). Peran etika profesi dalam meningkatkan kualitas guru di era digital. *Indonesian Research Journal on Education, 4*(4). https://doi.org/10.31004/irje.v4i4.1306

Sugiarti. (2023). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di SMA Negeri 1 Batang. *Jurnal Manajemen Pendidikan, 12*(1). https://doi.org/10.26877/jmp.v12i1.15295

Waseso, M.G. 2001. *Isi dan Format Jurnal Ilmiah*. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan artikel dan Pengelolaan jurnal Ilmiah, Universitas Lambungmangkurat, 9-11Agustus

Wulansari, S. U., Manda, D., Torro, S., & Najamuddin. (2024). Moving class: Eksplorasi penerapan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran sosiologi di SMAN 4 Makassar. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan, 12*(2). https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/download/14821/7294

Zahrok, A. L. N. (2020). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 8*(2), 196–204. https://doi.org/10.21831/jamp.v8i2.31288